

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN
KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan di BEI periode 2017-2019)

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana**



MARIA REGINA LEONY PERMATASARI

1117 29650

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN KONSERVASTIME AKUNTANSI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MARIA REGINA LEONY PERMATASARI

No Induk Mahasiswa: 111729650

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 5 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Atika Jauhariah Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Penguji

Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS, Ak., CA.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN *KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan di BEI periode 2017-2019)

MARIA REGINA LEONY PERMATASARI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

Jalan Seturan Yogyakarta 55281

e-mail: marialeony08@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influences of financial distress, good corporate governance, corporate social responsibility, and accounting conservatism on tax avoidance. Financial distress is measured by Altman Z-Score modification. Corporate social responsibility measured by the proxy of Corporate Social Responsibility Index (CSRI) based on the indicator of Global Reporting Initiative (GRI), and tax avoidance measured using Effective Tax Rate (ETR). The population in this research are banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, which are 43 companies. The research sample amounted to 30 companies with 90 observational data obtained by purposive sampling method. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results of the research showed that financial distress and accounting conservatism do not have a negative effect on tax avoidance. Independent board of commissioners dan audit committee do not have a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership has a positive effect on tax avoidance and corporate social responsibility has a negative effect on tax avoidance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keywords: financial distress, intitutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, corporate social responsibility, accounting aconservatism, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib dari individu ataupun perusahaan terhadap pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang timbul untuk kepentingan bersama, tanpa kontraprestasi secara langsung. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan aturan UU perpajakan yang berlaku dan dilakukan baik pemerintah pusat ataupun daerah. Dana dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya sebagai wujud partisipasi untuk mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat. Membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk pengabdian dan dukungan kepada pemerintah dalam usaha pembelaan negara.

Pemerintah dan wajib pajak di dalam pelaksanaan pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah terus mengambil langkah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak dalam rangka mendanai penyelenggaraan negara, sementara mayoritas wajib pajak berupaya membayar pajak serendah mungkin sebab melalui membayar pajak dianggap sebagai pengurang penghasilan atau laba (Chen et al., 2010). Bagi perusahaan pajak dapat dikatakan menjadi beban karena mampu menurunkan net income perusahaan karena dengan menyetorkan pajak sama dengan melakukan transfer kekayaan perusahaan kepada negara sebagai wujud pelunasan akan beban pada perusahaan. Tidak adanya timbal balik secara langsung menyebabkan sebagian besar perusahaan tidak membayar pajak dengan sukarela. Selain itu terdapat sanksi yang dapat merugikan perusahaan apabila perusahaan berusaha untuk tidak membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan selalu membayar pajak namun dengan mengecilkan beban pajak yang harus dilunasi. Pada masa pandemi covid 19, kebijakan *physical distancing* mengakibatkan sejumlah aktivitas menjadi terhambat, salah satunya berdampak pada pelaporan pajak. Dalam mempermudah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak melaporkan pajak tahunannya, dapat melalui e-filling yang merupakan sistem pelaporan pajak tahunan yang dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat mengisi formulir SPT Tahunan secara online tanpa perlu datang ke KPP. Dengan demikian, penggunaan e-filling menjadikan pelaporan pajak lebih efisien. Penelitian terkait pajak pada masa pandemi covid 19 telah dilakukan oleh Hatta (2020) yang meneliti kesuksesan penggunaan e-filling di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi menjadi penentu wajib pajak dalam menggunakan e-filling.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah skema transaksi dalam upaya penghindaran pajak secara legal yang ditunjukkan dengan upaya menurunkan total pajak terutang melalui pemanfaatan celah (*loopholes*) yang ada pada aturan perpajakan yang tidak menentang aturan perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak (Dewi & Jati, 2014). *Tax avoidance* dilakukan sebagai sebuah upaya yang dilaksanakan wajib pajak dalam menekan biaya pajak menggunakan berbagai metode yang dimungkinkan pada UU perpajakan sehingga secara etik tidak dianggap salah. Pengaplikasian *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, serta konservatisme akuntansi dalam perusahaan perbankan akan berpengaruh besar dalam perwujudan pengelolaan dan pengamatan aktivitas ekonomi, juga dalam penyusunan laporan keuangan. Selain mampu mencegah tindakan penggelapan dana, juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya *financial distress* terhadap kondisi keuangan perusahaan.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, teori agensi memiliki peran yang penting dalam hal tersebut. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori agensi adalah bentuk kontrak kerja sama dalam suatu hubungan keagenan dan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, satu atau lebih prinsipalnya memakai agen. Prinsipal dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki saham, pemilik, serta investor pada perusahaan dan agen ialah orang yang diberikan wewenang oleh prinsipal menjadi manajer dalam menjalankan tugas yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diamanatkan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Apabila prinsipal tidak mampu melihat upaya agen dengan langsung maupun menaksir output dengan akurat, maka agen memiliki kemungkinan dalam kontrak kerjanya akan menjalankan upaya yang berbeda dengan yang telah disetujui diawal. *Agency problem* atau konflik keagenan biasa terjadi akibat adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi disaat pihak manajemen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan dibandingkan pihak prinsipal. Ketika manajemen mengetahui informasi lebih banyak, maka ia mampu memanipulasi laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya manajemen bertindak dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik. Pendapat dari (Jensen & Meckling, 1976), asimetri informasi memiliki dua macam, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Biaya yang perusahaan keluarkan untuk menangani masalah keagenan dinamakan dengan biaya keagenan (*agency costs*).

Teori Stakeholder

Pendekatan *stakeholder* memiliki latar belakang keinginan untuk membuat sebuah kerangka kerja yang tanggap pada permasalahan yang ditemui para manajer pada saat itu yaitu perubahan lingkungan. Manajemen *stakeholder* bertujuan menyusun metode yang dipakai dalam mengoperasikan beragam kelompok serta relevansi yang diwujudkan melalui teknik yang strategis. Menurut Ghozali & Chariri (2007), perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi wajib bermanfaat bagi semua *stakeholder*, yaitu pemilik saham, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, serta lain-lain. Deegan et al., (2000) menjelaskan bila teori *stakeholder* berfokus pada akuntabilitas organisasi diatas kinerja keuangan maupun ekonomi sederhana. Ardian (2013) menjelaskan bahwa dalam menentukan keputusan diperlukan sebuah informasi, terutama yakni informasi yang memiliki hubungan pada kegiatan tanggung jawab perusahaan (CSR). *Stakeholder theory* memiliki tujuan utama yaitu menunjang manajer bisnis memahami lingkungan pemangku kepentingan mereka serta menangani hubungan yang ada di lingkungan perusahaan secara lebih efektif.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KAJIAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah seluruh wujud kegiatan yang berdampak pada kewajiban perpajakan, termasuk aktivitas kena pajak dan kegiatan khusus pengurangan pajak. Penghindaran pajak umumnya dilaksanakan melalui pemanfaatan kelemahan UU perpajakan yang seolah-olah tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan sebuah skema transaksi yang tujuannya mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah pada undang-undang perpajakan sehingga para ahli pajak dapat menyatakannya legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Shafer & Simmons, 2008).

Financial Distress

Brigham & Daves (2003) menyatakan *financial distress* muncul di saat perusahaan tidak mampu menyelesaikan jadwal pembayaran maupun ketika proyeksi arus kas memperlihatkan bila perusahaan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan segera. Terjadinya *financial distress* dikarenakan perusahaan tidak dapat menjalankan dan mempertahankan kinerja perusahaan yang berawal dari ketidakberhasilan dalam mempublikasikan produk yang berujung membuat kerugian secara operasional serta kerugian bersih karena penerimaan yang menurun dan penjualan yang sedikit. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan ataupun likuiditas yang menandakan awal dari kebangkrutan. Menganalisis laporan keuangan pada sebuah perusahaan sangat penting dilakukan untuk meramalkan kontinuitas atau kelanjutan kegiatan perusahaan.

Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ialah sebuah prosedur yang diimplementasikan untuk menegakkan prinsip keadilan dan pengamatan pada suatu instansi dan diharapkan mampu menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. *Corporate governance* pun memiliki andil pada usaha meraih kinerja bisnis yang optimal dan pada analisa serta pengendalian risiko bisnis yang dialami oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah sebuah rangkaian mekanisme

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang mengarahkan serta mengelola antara hak dan tanggungjawab perusahaan terhadap para *stakeholder*. Pengelolaan perusahaan yang baik bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai serta tindakan yang adil terhadap pemilik saham juga pihak yang memiliki kepentingan lainnya dengan memaksimalkan penambahan nilai pemilik saham.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dipunyai pihak institusi yang berwujud yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan dengan bentuk perseroan, dana pensiun, serta institusi lainnya. Keberadaan kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan dapat mendorong meningkatnya pengamatan yang semakin maximum pada kinerja manajemen. Pemilik institusional mempunyai insentif dalam memastikan bila manajemen perusahaan mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan kemakmuran para pemilik saham.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai relasi terhadap pemilik saham pengendali, anggota direksi, serta dewan komisaris yang lain. Keberadaan dewan komisaris mampu menaikkan monitoring pada kinerja direksi, apabila jumlah dewan komisaris independen makin banyak, artinya monitoring yang dijalankan oleh manajemen mampu makin ketat. Monitoring yang makin ketat mengakibatkan manajemen untuk berperilaku semakin berhati-hati pada pengambilan keputusan serta terbuka untuk mengoperasikan perusahaan, sehingga praktik *tax avoidance* mampu diminimalisir.

Komite Audit

Komite audit mempunyai tugas menyampaikan opini atau masukan pada dewan komisaris berdasarkan laporan maupun perihal yang disampaikan dewan direksi, melakukan identifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dewan komisaris, serta menjalankan tugas-tugas lain yang berhubungan pada tugas dewan komisaris. Komite audit digambarkan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Komite

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

audit bertanggung jawab atas kekeliruan pelaporan keuangan supaya laporan keuangan relevan dan mampu diandalkan (*reliable*).

Corporate Social Responsibility

World Bank Group menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen bisnis berkesinambungan yang memiliki kontribusi pada perekonomian lewat kerjasama terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta pengaruh terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat umum dengan tujuan menaikkan mutu fasilitas serta keberlangsungan hidup khalayak umum melalui metode yang berguna, baik pada sebuah bisnis, pembangunan, ataupun untuk masyarakat luas. CSR melibatkan seluruh hubungan yang terjadi di dalam perusahaan dengan seluruh *stakeholder* termasuk pelanggan, karyawan, komunitas, pemilik ataupun investor, pemerintah, bahkan kalangan masyarakat. Apabila perusahaan mengelola CSR dengan baik, maka perusahaan itu mampu memperoleh manfaat serta keuntungan yang signifikan berupa citra perusahaan, yakni terkait perihal rekrutmen, referensi serta motifasi pegawai, dan menjadi masukan dalam menjalin serta mempertahankan kerjasama.

Konservatisme Akuntansi

Konservatisme muncul akibat terdapatnya kecenderungan dari pihak manajemen dalam melaporkan aset bersih pada nilai terendah. Konservatisme akuntansi adalah pedoman kehati-hatian pada saat pelaporan keuangan dan perusahaan tidak tergesa-gesa untuk mengukur serta mengakui aset, keuntungan serta secepatnya mengakui kerugian dan hutang yang dimungkinkan dapat terjadi. Konsep ini menunjukkan bahwa biaya diakui lebih cepat sedangkan pendapatan diakui sangat lama, jadi *net income* lebih terlihat sedikit, kemudian konservatisme mampu mengakibatkan pelaporan keuangan yang pesimistik dan hal itu dapat melemahkan optimisme dari pemakai laporan (Ardina & Januarti, 2012).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Kondisi *financial distress* adalah sebuah pertanda yang dapat menyebabkan kebangkrutan dan kesukaran likuiditas yang begitu parah, sehingga menjadikan perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas operasional secara baik. Richardson et al., (2015) dan Saputra et al., (2017) sukses membuktikan terdapatnya pengaruh yang positif di antara *financial distress* pada *tax avoidance*, yang memiliki arti bahwa semakin sulit keadaan keuangan yang terjadi di perusahaan, maka aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan kemungkinan mampu naik. Perusahaan yang tengah menghadapi *financial distress* akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir pengeluaran kas perusahaan dalam menangani permasalahan keuangan perusahaan. Perusahaan yang terjebak pada *financial distress* memiliki potensi untuk merevisi kebijakan akuntansi mereka yang bertujuan meningkatkan pendapatan operasional untuk sementara waktu supaya mampu melunasi hutangnya, atau merevisi kemampuan mereka dalam membayar hutang kepada kreditor (Frank et al., 2009). Dengan demikian, semakin tinggi kemungkinan *financial distress* yang dialami perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ini yaitu:

H1: *Financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional di dalam perusahaan mampu memicu naiknya monitoring pada kinerja manajemen. Kepemilikan institusional berperan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan, serta memberi pengaruh manajer pada manajemen pajak (Shafer & Simmons, 2008). Pada penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014), hasil penelitiannya menyampaikan bila kepemilikan institusional yang makin tinggi, maka level monitoring pada manajer akan semakin besar kemudian mampu menekan konflik kepentingan di antara manajemen, jadi persoalan keagenan semakin sedikit, begitu juga dengan peluang *tax avoidance* yang berkurang. Dengan demikian, makin besar tingkat kepemilikan institusional,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

artinya level pengawasan pada manajer menjadi makin tinggi, jadi manajer tidak berani untuk melakukan manipulasi terhadap pajak, sehingga peluang *tax avoidance* menjadi semakin kecil. Dari penjelasan itu, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ialah:

H2: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan dewan komisaris independen diharap mampu menjadi penyeimbang di antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham di perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat memperjuangkan ketaatan perpajakan pada perusahaan sebagai wujud tanggung jawab pada keperluan pemegang saham publik, sehingga mampu mencegah praktik *tax avoidance*. Pada penelitian Pramudito & Sari (2015), membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak memengaruhi *tax avoidance* sebab ukuran dari dewan komisaris tidak mampu memberi pengaruh pada kebijakan akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen cenderung tidak melaporkan pajak lebih rendah karena dewan komisaris independen kurang mampu memberi pengaruh pada kebijakan akuntansi yang memiliki kaitan dengan kebijakan perpajakan pada perusahaan. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ialah:

H3: Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit wajib menolong dewan komisaris dalam memastikan mengenai laporan keuangan serta penyelenggaraan audit baik eksternal ataupun internal, telah terselenggara secara benar serta selaras pada pedoman yang berlaku. Pengawasan yang komite audit lakukan pada saat proses penyusunan laporan keuangan serta pengawasan internal diyakini mampu mengurangi agresivitas tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Dalam penelitian Maharani & Suardana

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2014), menemukan bagaimana komite audit memengaruhi secara negatif pada *tax avoidance*. Mereka menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai komite audit lebih mempunyai tanggung jawab serta transparan pada penyajian laporan keuangannya. Hal tersebut disebabkan komite audit hendak memantau semua aktivitas yang terjadi di perusahaan. Diantari & Ulupui (2016), dalam penelitiannya juga menemukan komite audit memengaruhi secara negatif pada *tax avoidance*. Adanya komite audit yang semakin tinggi pada perusahaan mampu menaikkan mutu *good corporate governance* pada perusahaan, jadi peluang adanya praktik *tax avoidance* akan berkurang. Dengan demikian, komite audit yang semakin tinggi mengakibatkan kualitas *good corporate governance* akan ikut meningkat, sehingga peluang *tax avoidance* menjadi semakin kecil. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ialah:

H4: Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Pajak adalah suatu wujud tanggung jawab sosial perusahaan pada *stakeholder* lewat pemerintah, dengan begitu perusahaan yang ikut dalam *tax avoidance* merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis & Richardson, 2013). Perusahaan mampu membina hubungan baik dengan pemerintah melalui membayar pajak secara penuh kesadaran serta berdasarkan nominal yang ditentukan. Keputusan perusahaan dalam menekan tingkat pajak maupun menjalankan *tax avoidance* terpengaruh dari sikapnya pada CSR yaitu perusahaan bukan sekedar beraktivitas demi kepentingannya sendiri, namun juga dalam kepentingan seluruh pihak termasuk *stakeholder* yang mendapatkan pengaruh dari aktivitas perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). Pada penelitian terdahulu oleh Lanis & Richardson (2013), Yoehana (2013) dan Purwanggono (2015), ditemukan bila CSR memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hasil dari penelitian terdahulu, apabila tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan makin tinggi, maka tingkatan perusahaan mempraktikkan *tax avoidance* diharapkan makin rendah sebab perusahaan yang telah menerapkan CSR mampu kehilangan reputasi di mata *stakeholder*, masyarakat, serta pemerintah, dan dapat menurunkan citra

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

serta pengaruh positif dari CSR yang sudah diterapkan pada perusahaan. Dari penjelasan itu, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ialah:

H5: *Corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan konservatisme akuntansi mampu menghalangi terjadinya asimetri informasi melalui teknik pembatasan pada agen agar tidak menjalankan tindakan manipulasi laporan keuangan. Penerapan konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan dapat menimbulkan sikap kehati-hatian terhadap penyusunan laporan keuangan yang makin besar serta aktivitas *tax avoidance* mampu makin kecil dalam pelaksanaannya. Penelitiannya Sarra (2017) dan Kurniaty (2016), membuktikan bila konservatisme akuntansi memengaruhi secara negatif yang signifikan pada *tax avoidance*. Pengaplikasian konservatisme akuntansi dapat menimbulkan laba perusahaan menjadi bias ke bawah, maka pajak perusahaan pun ikut ke bawah. Perbuatan *tax avoidance* pada perusahaan akan diminimalisir karena beban pajak yang dibebankan lebih rendah. Dengan demikian, apabila penerapan konservatisme akuntansi semakin besar, maka peluang dalam menjalankan *tax avoidance* menjadi semakin sedikit. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ialah:

H6: Konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris dan berfokus pada pengaruh variabel-variabel yang akan diuji terhadap praktik *tax avoidance* yang mungkin akan terjadi pada perusahaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan dari perusahaan sektor perbankan yang telah tercatat di BEI dan sudah dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan data time series pada periode 2017-2019. Data yang dipergunakan dalam penelitian diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sampel dan Data Penelitian

Populasi yang digunakan peneliti ialah data laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang tercatat dalam BEI pada tahun 2017-2019 dengan jumlah 43 perusahaan. Penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Penentuan sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan penggunaan penelitian. Kriteria penentuan pengambilan sampelnya yaitu:

1. Perusahaan perbankan yang sudah tercatat dalam BEI dan laporan keuangannya telah dipublikasikan sepanjang tahun 2017-2019.
2. Perusahaan perbankan yang tidak merugi sepanjang tahun 2017-2019, disebabkan kerugian akan menyebabkan ETR berubah negatif.
3. Perusahaan perbankan dengan data-data lengkap yang dibutuhkan peneliti, yaitu perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan serta mengungkap kegiatan perusahaan pada laporan tahunan sepanjang periode penelitian.
4. Perusahaan perbankan yang memakai satuan mata uang Rupiah (Rp) sepanjang tahun 2017-2019.

Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Financial distress	Pada penelitian ini digunakan rumus Altman Z-score yang mampu dipergunakan untuk memprediksikan keadaan <i>financial distress</i> sebuah perusahaan	$Z = 6,56 Z_1 + 3,26 Z_2 + 6,72 Z_3 + 1,05 Z_4$
2	Kepemilikan institusional	Diukur dengan presentase yakni membandingkan antara total saham milik institusi dengan total saham yang beredar.	$\frac{\text{Total saham milik institusi}}{\text{Total saham beredar}}$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3	Dewan komisaris independen	Diukur dengan presentase perbandingan antara banyaknya dewan komisaris independen dengan banyaknya anggota dewan komisaris.	$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$
4	Komite audit	Diukur dengan menggunakan banyaknya komite audit dalam sebuah perusahaan.	Jumlah komite audit
5	Corporate social responsibility	Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan proksi <i>Corporate Social Responsibility Index</i> (CSRI) berdasar pada indikator <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI).	$\frac{\sum X_i}{n}$
6	Konservatisme akuntansi	Pengukuran dengan cara penjumlahan laba bersih dan depresiasi dikurangi dengan arus kas operasi kemudian dibagi dengan total aset.	$\frac{(\text{LB} + \text{Depresiasi}) - \text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$
7	Tax avoidance	Pengukuran dengan ETR merupakan biaya dari pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.	$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Metode dan Teknik Analisis Data

Agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran karakteristik objek penelitian, maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Uji analisis data yang dilakukan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, uji model, uji determinasi, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Pada uji normalitas digunakan metode

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian dikatakan normal jika memperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi di antara variabel independen. Model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila angka *tolerance value* lebih besar dari 0,01 dan angka *Variance Inflation Factors* (VIF) lebih kecil dari 10. Metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas yaitu uji glejser dan grafik *scatterplot*. Uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson (DW).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Sampel

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, didapatkan 65 sampel data yang terpilih sebagai sampel data penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	60	-0,26	4,34	2,04	1,7679	1,16558
Kepemilikan Institusional	60	0,33	0,99	0,66	0,7319	0,17783
Dewan Komisaris Independen	60	0,40	1,00	0,70	0,5755	0,09922
Komite Audit	60	3,0	6,00	4,50	3,6000	0,80675
CSR	60	0,29	0,68	0,49	0,4509	0,09956
Konservatisme Akuntansi	60	-0,10	0,10	0,00	0,0104	0,04285
Tax Avoidance	60	0,18	0,34	0,26	0,2501	0,03373
Valid N (listwise)	60					

Berdasarkan hasil analisis data yang dilampirkan diatas, maka deskriptif tiap-tiap variabel dapat disimpulkan yakni:

1. *Financial Distress* (X1) ditandai dengan nilai z-score yang semakin kecil. Hasil di atas didapatkan nilai mean sebesar 1,7679 dan nilai median sebesar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2,04 yang berarti nilai mean untuk *financial distress* berada di sebelah kiri nilai median yang menandakan perusahaan perbankan yang mengalami *financial distress* cenderung tidak banyak. Angka untuk nilai mean tersebut berada di antara 1,23 hingga 2,9, maka dalam hal ini mayoritas perusahaan yang diamati yaitu perusahaan yang berada pada zona abu-abu.
2. Kepemilikan Institusional (X2) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 0,7319 dan nilai median 0,66 yang berarti nilai mean untuk kepemilikan institusional berada di sebelah kanan nilai median yang menandakan saham pada perusahaan perbankan banyak dimiliki oleh pemilik institusional. Angka tersebut menandakan presentase kepemilikan institusional sebesar 73,19% yang mendekati angka maximum berarti presentase kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan tinggi membuat pengamatan oleh manajemen menjadi makin baik.
 3. Dewan Komisaris Independen (X3) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 0,5755 dan nilai median 0,70 yang berarti nilai mean untuk dewan komisaris independen berada di sebelah kiri nilai median yang menandakan proporsi jumlah dewan komisaris independen pada perusahaan perbankan cenderung lebih sedikit. Angka tersebut menandakan presentase dewan komisaris independen sebesar 57,55% yang cenderung lebih dekat dengan angka minimum berarti dewan komisaris independen dipandang kurang ketat dalam mengawasi manajemen dan direksi.
 4. Komite Audit (X4) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 3,6000 dan nilai median 4,50 yang berarti nilai mean untuk komite audit berada di sebelah kiri nilai median yang menandakan jumlah komite audit pada perusahaan perbankan cenderung lebih sedikit. Angka mean tersebut menandakan komite audit mampu melakukan pengawasan dengan baik terhadap laporan keuangan sehingga mampu menekan tindakan *tax avoidance*.
 5. *Corporate Social Responsibility* (X5) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 0,4509 dan nilai median 0,49 yang berarti nilai mean untuk *corporate social responsibility* berada di sebelah kiri dekat dengan nilai median yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menandakan bahwa rata-rata perusahaan perbankan menerapkan *corporate social responsibility* namun juga terdapat perusahaan perbankan yang tidak menerapkan *corporate social responsibility* pada perusahaannya.

6. Konservatisme Akuntansi (X6) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 0,0104 dan nilai median 0.00 yang berarti nilai mean untuk konservatisme akuntansi berada di sebelah kanan dekat dengan nilai median yang menandakan tidak banyak namun juga tidak sedikit perusahaan perbankan yang menerapkan konservatisme akuntansi. Angka pada nilai mean tersebut menandakan konservatisme akuntansi mampu mencegah asimetri informasi serta manipulasi laporan keuangan.
7. *Tax avoidance*/ETR (Y) menurut hasil di atas didapatkan nilai mean 0,2501 dan nilai median 0.26 yang berarti nilai mean untuk *tax avoidance* berada di sebelah kiri dekat dengan nilai median yang menandakan perusahaan perbankan memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance* maupun tidak melakukan *tax avoidance*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	60
Mean	0
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation	0,02807985
Most Extreme Absolute	0,14
Differences Positive	0,14
Negative	-0,092
Kolmogorov-Smirnov Z	1,085
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,190

Hasil nilai dari *asymptotic significance (2-tailed)* yaitu 0,190. Hal tersebut menunjukkan nilai *asymptotic significance (2-tailed)* yaitu $0,190 > 0,05$.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu uji normalitas pada model ini dapat dinyatakan memiliki distribusi yang normal sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Financial Distress	0,771	1,298
Kepemilikan Institusional	0,883	1,132
Dewan Komisaris		
Independen	0,821	1,218
Komite Audit	0,734	1,363
CSR	0,745	1,343
Konservatisme Akuntansi	0,881	1,134

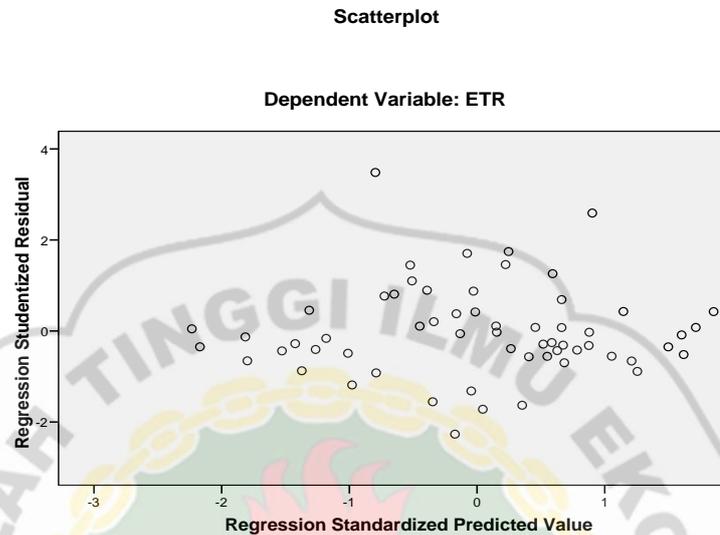
Pada tabel tersebut dapat dilihat untuk setiap variabel independen memperoleh angka *tolerance value* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, sehingga mampu diambil kesimpulan tidak ada multikolinearitas di antara variabel independen yang terdapat pada model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
	1 (Constant)	0,074	0,024		3,111
Financial Distress	-0,001	0,002	-0,073	-0,500	0,619
Kepemilikan Institusional	-0,031	0,015	-0,283	-2,088	0,042
Dewan Komisaris					
Independen	-0,011	0,027	-0,057	-0,403	0,689
Komite Audit	0,000	0,004	-0,014	-0,093	0,926
CSR	-0,048	0,029	-0,246	-1,661	0,103
Konservatisme Akuntansi	0,010	0,061	0,023	0,166	0,869

Grafik Scatterplot



Diperoleh hasil tabel uji glejser dengan nilai sig. *financial distress* 0,619, kepemilikan institusional 0,042, dewan komisaris independen 0,689, komite audit 0,926, *corporate social responsibility* 0,103, dan konservatisme akuntansi 0,869 yang berarti sig. tersebut memiliki nilai diatas 0,05. Model regresi ini dapat dikatakan bebas dari gejala heterokedastisitas. Hal ini didukung grafik *scatterplot* yang memperlihatkan tidak terbentuk suatu pola tertentu serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka simpulannya tidak ada heterokedastisitas dalam model regresinya. Berdasar masukan variabel independen *financial distress*, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, CSR, dan konservatisme akuntansi mengakibatkan model regresi layak untuk menguji peningkatan *ETR*.

4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,554(a)	,307	,229	,029627	1,311

Menurut hasil pengujian dari tabel tersebut, diperoleh nilai DW senilai 1,311 yang memiliki arti nilai tersebut terletak antara -2 hingga +2 sehingga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

simpulannya berdasarkan urutan waktu tidak terjadi autokorelasi atau tidak terdapat korelasi antar data.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan nilai sig. 0,971 di atas 0,05 serta nilai t hitung -0,037 di bawah 2,000 T test (tabel), artinya *financial distress* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang negatif pada beta mengartikan hipotesis pertama tidak terdukung. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan perusahaan yang tengah menghadapi *financial distress* akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir pengeluaran kas perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan. Perusahaan pada kondisi *financial distress* memperlihatkan tidak terdapatnya efektivitas dalam penggunaan aset perusahaan, sehingga menimbulkan menurunnya keuntungan dari yang seharusnya diperoleh. Hal ini menyebabkan nominal pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah sehingga menurunkan niat perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Terdapat pernyataan yakni perusahaan yang mengalami rugi terbebas dari beban pajak penghasilan dan akan mendapat fasilitas kompensasi kerugian pada masa yang akan datang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rani (2017) yang menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial antara *financial distress* dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai sig. 0,002 di bawah 0,05 serta nilai t hitung 3,288 di atas 2,000 T test (tabel), artinya kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang positif pada beta mengartikan hipotesis kedua tidak terdukung. Tinggi atau rendahnya presentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*. Pemilik institusional memiliki peranan penting dalam mengamati, mendisiplinkan, serta memengaruhi manajer. Maka sudah seharusnya manajemen menghindari perilaku untuk mementingkan dirinya sendiri. Pemilik institusional memiliki insentif untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memastikan manajemen telah menentukan keputusan yang mampu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena untuk mengontrol tindakan manajemen atas sikap oportunistik dalam melaksanakan manajemen laba tidak cukup hanya dengan mengandalkan struktur kepemilikan. Penelitian ini sependapat dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014) yakni tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan nilai sig. 0,515 di atas 0,05 serta nilai t hitung 0,656 di bawah 2,000 T test (tabel), artinya dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang positif pada beta mengartikan hipotesis ketiga tidak terdukung. Pengamatan yang tidak dilaksanakan secara profesional oleh dewan komisaris independen mampu mendorong pihak manajemen untuk menuruti atau tidak menuruti peraturan perundangan yang berlaku secara pro aktif, sehingga dapat dikatakan kehadiran dewan komisaris independen tidak memengaruhi pajak yang dijalankan oleh manajemen (Masrullah et al., 2018). Hasil ini selaras dengan penelitian Puspita & Harto (2014) yang mengatakan tidak adanya hubungan yang signifikan di antara presentase dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* diakibatkan pengambilan keputusan pajak yang tidak signifikan oleh dewan komisaris independen dalam perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji signifikansi memperlihatkan nilai sig. 0,957 di atas 0,05 serta nilai t hitung 0,055 di bawah 2,000 T test (tabel), artinya komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang positif pada beta mengartikan hipotesis keempat tidak terdukung. Hal tersebut menunjukkan total anggota komite audit yang tugasnya menjalankan pengawasan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan belum tentu mampu menjamin komite audit menghalau pihak manajemen dalam melaksanakan kecurangan. Jumlah anggota belum cukup untuk mewakili keefektifan komite audit, namun dengan adanya pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang cukup dari setiap anggota komite

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

audit mampu menambah keefektifan komite audit. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rani (2017) dan Putri & Chariri (2017) yakni tidak terdapat pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian memperlihatkan nilai sig. 0,021 di bawah 0,05 serta nilai t hitung 2,374 di atas 2,000 T test (tabel), artinya *corporate social responsibility* berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang negatif pada beta mengartikan hipotesis kelima terdukung. Tingkat pengungkapan CSR yang semakin tinggi pada perusahaan menyebabkan praktik *tax avoidance* menjadi semakin rendah. Hasil penelitian ini menunjang hipotesis yang mengatakan apabila tingkat pengungkapan CSR pada sebuah perusahaan makin tinggi, maka tingkat perusahaan menjalankan praktik *tax avoidance* diharapkan semakin rendah sebab perusahaan yang telah menerapkan CSR mampu kehilangan citra di muka *stakeholder*, masyarakat, dan pemerintah, serta dapat mengurangi nilai dan dampak positif dari CSR yang sudah diterapkan pada perusahaan. Hasil ini selaras dengan penelitian Lanis & Richardson (2013), Yoehana (2013) dan Purwanggono (2015), yang menemukan terdapat pengaruh signifikan antara CSR dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan nilai sig. 0,117 di atas 0,05 serta nilai t hitung 1,594 di bawah 2,000 T test (tabel), artinya konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Angka yang negatif pada beta mengartikan hipotesis keenam tidak terdukung. Hal ini memperlihatkan bahwa kecenderungan perusahaan untuk menjalankan tindakan *tax avoidance* tidak akan meningkat jika menerapkan penggunaan metode akuntansi yang konservatif, kemudian peluang untuk menjalankan *tax avoidance* menjadi lebih sempit dengan adanya Peraturan Pemerintah. Pemerintah menggunakan prinsip konservatisme akuntansi dalam hal perpajakan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah misalnya membuat cadangan piutang ragu-ragu terkecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi, berdasar pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (6) UU Nomor 7 tahun 1983 terkait PPh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang telah dirubah berulang kali sampai perubahan yang terbaru. Hasil ini sependapat dengan penelitian Pramudito & Sari (2015).

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis data yang sudah diujikan, didapatkan hasil yaitu:

1. *Financial distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap *tax avoidance*.
3. Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbukti memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap *tax avoidance*.
6. Konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mendapati sejumlah keterbatasan yang memungkinkan untuk dapat memengaruhi hasil penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Sampel yang digunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan dan penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil karena hanya menggunakan periode pengamatan selama tiga tahun di setiap perusahaan, yakni tahun 2017-2019.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang tidak mengalami rugi selama proses kegiatan perusahaan sehingga hasil yang didapatkan menjadi kurang optimal dan kurang sesuai dengan variabel *financial distress* yang seharusnya lebih menekankan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pengukuran *financial distress* dalam penelitian ini dibatasi hanya menggunakan model altman z-score dan *Effective Tax Rate (ETR)* digunakan untuk mengukur *tax avoidance*.
4. Nilai *Adjusted R-Square* yang rendah dari model yang diteliti senilai 0,229 (22,9%) menjelaskan bahwa variable yang berpengaruh lebih besar pada *tax avoidance* berasal dari variabel diluar penelitian senilai 0,771 (77,1%).

Saran

Menurut hasil penelitian yang sudah diutarakan, maka dapat diberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian pada sektor perusahaan yang lain seperti sektor perdagangan dan sektor jasa, karena struktur akuntansi tiap-tiap industri berbeda satu sama lain sehingga mampu memengaruhi hasil penelitian serta menambah periode jangka waktu penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang memengaruhi *tax avoidance* di luar variabel yang digunakan pada penelitian ini seperti ukuran perusahaan, karakteristik eksekutif, ataupun *sales growth*.
3. Penelitian selanjutnya guna memperkuat hasil penelitian yang sudah ada disarankan untuk mencoba menggunakan model perhitungan untuk *financial distress* dan ukuran *tax avoidance* yang lainnya, seperti penggunaan metode zmijewski, ohlson, dan fulmer untuk model perhitungan *financial distress* serta penggunaan metode pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan BTD (*Book Tax Differences*) untuk model perhitungan *tax avoidance*.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memasukan perusahaan yang mengalami kerugian ke dalam penelitian untuk mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Ardina, A. M. Y., & Januarti, I. (2012). Penggunaan Perspektif Positive Accounting Theory Terhadap Konservatisme Akuntansi Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–15.
- Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2003). *Intermediate Financial Management* (8th Editio). South-Western College.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). Firms' Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence. *Accounting Forum*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hatta, A. J. (2020). The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 57–68. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.2233>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kurniaty. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Struktur Kepemilikan terhadap Aggresive Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(1), 209–217.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://doi.org/10.1108/09513571311285621>

- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *SiMAk*, 16(2), 142–165.
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 705–722.
- Purwanggono, E. A. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Rani, P. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, financial distress, komite audit, dan komisaris independent terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 16–30. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The Influence of Ownership Structures, Financial Distress, and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31, 21–31.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63.
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2008). Social responsibility, Machiavellianism and tax avoidance: A study of Hong Kong tax professionals. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5), 695–720. <https://doi.org/10.1108/09513570810872978>
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi Universitas Diponegoro*.